

## OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Wildhan Indra Pramono<sup>1</sup>, Arthur Josias Simon Runturambi<sup>2</sup>

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

Wildhanindra,pramono@ui.ac.id, simonrbi@yahoo.com

### ABSTRAK

Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Analisa intelijen terkait penanganan konflik antar ormas terhadap kasus konflik Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) di DKI Jakarta, dan (2) Menganalisa optimalisasi peran Baintelkam Polri dalam penanganan konflik antar ormas di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Baintelkam Polri memiliki peran penting dalam memberikan deteksi dini khususnya dalam melakukan antisipasi gangguan kamtibmas, dalam konteks penelitian ini yakni konflik dan benturan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat.; (2) Baintelkam Polri juga wajib terus menerus melakukan pengasahan dan peningkatan kemampuan personel melalui Pendidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan assesment peningkatan kemampuan penyelidikan, penggalangan dan pengamanan.

**Kata kunci** : Ormas, konflik, Baintelkam, optimalisasi

### ABSTRACT

*Behind the positive side of the ongoing democratic process, there is a new problem, namely the threat of national disintegration. This concern arises not only from demands for separation of some of the people in several regions, but also because of the rampant social unrest in the regions, conflicts between mass organizations, election disputes at national and regional levels, conflicts over plantation land disputes, and other growing social unrest. into contention. In the context of handling conflicts between mass organizations related to acts of violence, which are commonplace and a concern for many groups, it is also a national interest. The objectives of this research are: (1) Intelligence analysis related to the handling of conflicts between mass organizations against the Pancasila Youth (PP) and Betawi Rempug Forum (FBR) conflict cases in DKI Jakarta, and (2) To analyze the optimization of the role of the National Police's Baintelkam in handling conflicts between mass organizations in DKI Jakarta. This study uses a qualitative data approach, using data sourced from interviews and literature studies. Data were analyzed using reduction and triangulation methods. The results of the research are: (1) Baintelkam Polri has an important role in providing early detection, especially in anticipating social security disturbances, in the context of this research, namely the conflict and clash between Pemuda Pancasila (PP) and Betawi Rempug Forum (FBR) which has an increasing tendency from year after year in tune with the development of various aspects of community life; (2) Baintelkam Polri is also obliged to continuously hone and improve the capabilities of its personnel through vocational education, trainings and assessments to increase the capacity of investigations, mobilization and security.*

**Keyword:** mass organizations, conflicts, National Police Intelligence Agency

## PENDAHULUAN

Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) terlibat bentrok di Bekasi, Sabtu 16 November 2019. Bentrokan itu diketahui terjadi di kantor sekretariat ranting PP Arenjaya Jalan Mandiri Raya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bentrokan itu bermula dari kegiatan yang dilakukan di Cafe Budi, Plaza Bekasi. Saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian diketahui berjumlah tiga orang. Ketiganya merupakan anggota ormas PP yakni Deni, Dani, dan Andri. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi Deni dan sejumlah orang lainnya datang ke Cafe Budi. Saat sedang berjoget, Dedi yang merupakan anggota FBR sempat menawarkan korek api kepada Deni. Ketika Deni akan mengambil korek api yang disodorkan Dedi, tiba-tiba Dedi menampar Deni dan kemudian mendorongnya.

Tak hanya itu, Dedi disebut juga mengambil botol bir yang ada di meja dan dilemparkan ke kaki Deni. Untuk menghindari keributan yang lebih besar, Deni dan tujuh anggota ormas PP akhirnya memilih pergi meninggalkan lokasi. Kemudian, sekitar pukul 05.00 WIB, Deni bersama Dani dan Andri yang tengah berada di sekretariat ranting PP Aren Jaya didatangi oleh kurang lebih 100 orang yang berasal dari ormas FBR menggunakan sepeda motor. Sedangkan anggota FBR lainnya, melakukan pengeroyokan terhadap Dani mengalami luka di bagian pinggan dan lengan. Sementara Andri berhasil menyelamatkan diri. (CNN Online, 18 November 2019).

Di atas merupakan salah satu contoh dari puluhan konflik antar ormas yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dikeluarkan Perppu ini dengan dasar bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Juga untuk menghindari konflik sosial yang timbul akibat gesekan antar ormas.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan UUD NRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari UUD NRI 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi yaitu mengenai Kebebasan berserikat dijamin di dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia. Bahwa setiap ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.

Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah Ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Sebut saja, organisasi pergerakan Boedi Oetomo. Ada yang mengatakan Boedi Oetomo sebagai Ormas tertua di Indonesia. Organisasi yang mencuat tanggal 20 Mei 1908 itu disebut-sebut sebagai garda depan dalam kebangkitan nasional. Memang, sempat ada perdebatan mengenai sejarah kebangkitan nasional. Kelompok pergerakan Islam mengklaim, Serikat Islam yang berdiri tanggal 16 Oktober 1905, dianggap pantas disebut sebagai dasar kebangkitan nasional. (Nia Kania, 2011:3).

Keberadaan Ormas termasuk yang menamakan dirinya Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dibutuhkan sampai saat ini, karena persoalan seperti ekonomi, politik sosial budaya tidak semuanya dapat disentuh secara keseluruhan oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly:

*“Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutananya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Dengan demikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.”* (Jimly, 2006:7).

Jumlah ormas yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada akhir tahun 2019 secara keseluruhan sebanyak 404.379 ormas. Jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 ormas dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385 ormas. Terakhir, ada 71 ormas yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jumlah ormas yang terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) sejumlah 25.812 ormas. Rinciannya, terdaftar di Kemendagri 1.688 ormas, di pemerintah provinsi berjumlah 8.170, dan di pemerintah kabupaten/kota 16.954 ormas. Kategori kedua, ormas

berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ada 393.497 ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham dengan rincian 163.413 berupa perkumpulan dan 30.084 berbentuk yayasan. Ketiga, ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenu). Jumlahnya, 72 ormas. (Website Resmi Kemendagri).

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dulu dikenal dengan nusantara dihuni oleh ratusan kelompok etnik yang tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial berdarah sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial-humaniora menyebut bahwa konflik SARA dibangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia. (Qodir, 2008:131). Di awal masa kemerdekaan konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad kedua puluh berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik. Perbedaan agama atau etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana.

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui "Jalan Reformasi Berdarah" telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis.

Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA. (Haris, 1999:5).

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelkan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadangkala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.

Politisasi identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan kelompok atau individu yang menjadikan agama dan budaya sebagai legitimasi untuk merebut pengaruh, kekuasaan, serta penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi. Hubungan antara identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi seringkali mengalami persoalan yang dilematis. Satu sisi agama dan budaya ingin mewujudkan hak-haknya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam skala lokal, namun di sisi lain negara menuntut lebih pelaksanaan kewajiban politiknya, ketika negara bukan lagi menjadi sasaran konflik, konflik cenderung mengarah pada pertentangan antar budaya (etnik) atau antar umat beragama dimana masing-masing pihak yang bertikai hendak mengimplementasikan hak-haknya. (Thahir, 2006:10).

Kondisi ini semakin parah ketika isu-isu mengenai kesenjangan sosial ekonomi mewarnai wacana kebangsaan dan kenegaraan, terutama ketika kaum pendatang menguasai sentra-sentra ekonomi. Adanya penguasaan akses ekonomi dari salah satu kelompok atau komunitas etnik serta etos kerja antar kelompok etnik dan budaya yang lebih dikuasai kelompok pendatang yang lebih

agresif dibanding pribumi berdampak pada munculnya kecemburuan sosial ekonomi dari pihak pribumi. Kelompok yang disebutkan terakhir ini menjadi buruh di daerahnya sendiri dan menjadi budak di lingkungan istananya sendiri.

Pada dasarnya setiap Ormas yang berpijak di bumi pertiwi, harus taat pada setiap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merujuk pada teori negara hukum (*rechstaat*) Jimly berpendapat bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. (Jimly, 2010:1). Karena itu jargon yang sering digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum yaitu *the rule of law not a man*. Selanjutnya yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Untuk itu ketika terjadi penyimpangan terhadap sistem yang telah dibuat seharusnya pemerintah menindak tegas setiap oknum yang melakukannya. Tetapi peran pemerintah dalam menghadapi ormas anarkis saat ini mulai dipertanyakan, alih-alih melindungi hak kebebasan orang lain yang merupakan amanat konstitusi dan salah satu elemen penting dari konsep negara hukum pemerintah justru tidak tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mendiskriminasi serta membuat resah masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang mengikis rasa aman, tuntutan atas pembubaran ormas anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengecam negara yang seperti tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. (Wardaya:51). Meskipun polemik atas pembubaran ormas masih terjebak dalam perdebatan sejumlah tokoh tetapi pemerintah harus melakukan tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi hak kebebasan masyarakat lain yang merasa bahwa kebebasannya telah direnggut oleh ormas anarkis yang menyebabkan rasa takut dan tidak aman di dalam negeri ini.

*Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan masyarakat, baik yang bertindak anarkis maupun biasa. Polisi juga menjadi penengah diantara dua desa yang mengalami konflik atau sengketa, agar tidak terjadi perpecahan yang semakin kisruh. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.*

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Penyusunan antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi ke depan atau dimasa mendatang ini diawali dengan kegiatan intelijen terhadap organisasi masyarakat. Peran intelijen secara prinsip adalah melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Intelijen akan mencari data dan mengolahnya menjadi informasi intelijen yang akan digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi yang diperoleh intelijen adalah informasi yang bersifat deteksi terhadap ancaman. Informasi tersebut dapat berguna sebagai suatu peringatan dini kepada pengguna untuk mengambil keputusan juga tindakan untuk mencegah ancaman tersebut terjadi. (Riyanta, 2015).

Dalam konteks ormas ini maka intelijen mencari, mengolah dan memberikan informasi kepada pimpinan yang bersifat pencegahan terhadap aksi anarkis dan meresahkan masyarakat. Intelijen juga memberikan analisa perkembangan skenario-skenario yang mungkin dihadapi. Dengan demikian dalam fungsi ini, intelijen melakukan investigasi dan analisa ancaman; melakukan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman tersebut yang langsung digunakan untuk operasi.

Informasi dari hasil kegiatan intelijen ini sangat diperlukan oleh Polri supaya tindakan yang dilakukan tepat sasaran.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era globalisasi, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak asasi manusia menjadi isu sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap inteijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa terjadi.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisa terkait penanganan konflik antar ormas oleh Baintelkam Polri dan bagaimana optimalisasi peran penegak hukum dalam penanganan konflik antar ormas tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan data dianalisa secara deskriptif. Irawan (2006) menyatakan, bahwa kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran intersubjektif, bukan kebenaran objektif. Kebenaran intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama.

## **TEMUAN DAN ANALISIS**

### **Akar Konflik Antar Ormas**

Pada dasarnya Manusia cenderung ingin hidup berkumpul dalam lingkungan masyarakat, serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Karakter dasar manusia tersebut merupakan hak alami natural right yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat Indonesia diimplementasikan dalam beragam bentuk, seiring dengan kompleksitas dan dinamika dalam masyarakat itu sendiri.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul merupakan hak warga negara yang sudah diatur dalam UUD, Namun kondisi yang berbeda terjadi pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto sangat alergi dengan persoalan yang mengganggu stabilitas negara, baik berupa kritik maupun penggerak massa. Pada masa pemerintahannya Ormas tetap berdiri dan menjalankan roda keorganisasiannya seperti biasa, tetapi Pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh kepada pemerintah, sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Beberapa kebijakannya khusus untuk Ormas dan partai politik harus berpegang teguh terhadap asas tunggal, semua organisasi baik Ormas maupun parpol harus berasa tunggal yaitu "Pancasila".

Ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun diluar pemerintah diantaranya:

1. Ormas Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
2. Ormas SOKSI;
3. Kosgoro;
4. Ormas kepemudaan, Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI.

Runtuhnya Orde Baru dari panggung kekuasaan, dimulai dengan perubahan sosio-politik yang sangat menentukan terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rezim Orde Baru tahun 1998 memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Memasuki era Reformasi kran demokrasi begitu terbuka sehingga melahirkan pemerintah yang efisien dan efektif. Dalam khasanah politik Indonesia, masa reformasi merujuk pada pemberhentian presiden Soeharto sebagai presiden republik Indonesia pada tanggal

21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto diakibatkan adanya protes yang bertubi-tubi dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Di tengah merosotnya keadaan sosial tersebut, wakil preside B.J Habibie kemudian dilantik menggantikan presiden Soeharto.

Tentu ada banyak faktor pemicu atau pendorong gerakan reformasi 1998. Yang perlu ditilik terkait dengan perkembangan industri, teknologi dan kapitalisme di zaman kontemporer adalah terbentuknya satu kelas baru. Ariel Heryanto mengidentifikasi adanya orang kaya baru (*new rich*) di Indonesia yang turut mengkonstruksi budaya dan kontestasi identitas kelompok, melalui budaya konsumsi, yang kemudian disebutnya sebagai kelas menengah (baru). (Ariel Heryanto, 1999:159) Ariel berpendapat bahwa konsumerisme dan konsumsi yang tinggi turut memainkan peranan penting dalam politik kultural Indonesia kontemporer. Kelas menengah baru itu diantaranya adalah kalangan alumni dari berbagai kampus, yang perannya dalam gerakan reformasi 1998, tak bisa diabaikan. Mereka terutama terdiri dari kalangan profesional berusia di atas 40an. Sebagian besar adalah “mantan” aktivis mahasiswa 1970/1980an. Karena situasi krisis ekonomi, sebagian dari mereka menderita karena bisnis yang anjlok atau bangkrut. Tidak ada pilihan lain, kecuali menengok gerakan mahasiswa sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan, baik karena motif-motif pribadi yang dilatari oleh kondisi ekonomi tersebut, maupun motif idealisme sisa-sisa masa mereka aktif dalam aktivisme politik tahuntahun 1970an dan awal 1980an. Apapun latar belakangnya, pada akhirnya mereka “turun gunung” dan bergabung dengan mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan mengendalikannya, khususnya melalui bantuan finansial pada gerakan mahasiswa.

Masa reformasi sering disebutkan dengan era keterbukaan, di mana kebebasan berpolitik telah menciptakan kondisi yang sangat mendukung terhadap bangkitnya kembali politik Islam dan tumbunya gagasan dan ide tentang formalisasi syari’at Islam di Indonesia. (Alhamdi, 2013:93).

Adapun beberapa indikator bangkitnya politik Islam di masa Pemerintahan B.J Habibie pada era reformasi yaitu:

1. Munculnya Ormas Islam pendukung gerakan formalisasi syari’at Islam;
2. Berdirinya partai-partai Islam;
3. Adanya tuntutan pemberlakuan piagam Jakarta dalam konstitusi;
4. Munculnya gerakan penegakan syari’at Islam di daerah.

Hal ini terjadi karena saat itu adanya fenomena angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia khusus bagi mereka yang ingin mendirikan Ormas. Ormas dengan berbagai latar belakang muncul dan ingin menjadi bagian dari demokrasi yang sebelumnya dibelenggu oleh rezim Soeharto.

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.

Apa bila kita melihat asumsi yang didapat dari teori mobilisasi sumber daya, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan non institusional dan baik aksi institusional maupun non institusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan. Asumsi tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang terdapat dalam organisasi kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisah dari organisasi. Artinya setiap tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok (organisasi) merupakan suatu tindakan dibawah tanggung

jawab organisasi. Berdasarkan asumsi tersebut pula maka setiap organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anggotanya.

Berdasarkan asumsi dari teori mobilisasi sumber daya tersebut, asumsi tersebut dapat diperkuat dengan Analisis Circle Of Conflict untuk melihat masalah hubungan, data, struktural, dan perbedaan nilai.

Pertama data (informasi). Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya informasi hilang atau informasi yang dimiliki kurang, atau adanya pandangan yang berbeda tentang informasi. Interpretasi yang berbeda dari data yang diterima menjadi berbeda dengan data dinilai. Titik kunci di sini adalah bahwa data atau informasi adalah akar masalahnya. Ormas di Indonesia kehadirannya di tengah masyarakat menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut. Bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya, utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan, berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan berpotensi menjadi alat untuk melegalisasikan keberadaan premanisme.

Kedua adalah struktural. Konflik struktural pada umumnya disebabkan oleh pola atau interaksi perilaku yang destruktif; kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber daya yang tidak setara; kekuasaan dan otoritas yang tidak setara; serta faktor-faktor geografis, fisik, dan lingkungan yang menghalangi kerjasama. Melihat kondisi yang ada di Indonesia, Pemerintah belum secara optimal merangkul Ormas. Hal tersebut terwujud dengan tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ormas, dan setiap kali terjadi konflik maupun pasca konflik, pemerintah jarang secara langsung melakukan upaya penanganan masalah.

Pada posisi tersebut terdapat signifikansi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai konflik besar, baik kebijakan pencegahan, penghentian, dan maupun pemulihan pasca konflik. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian konflik bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya penanganan sampai kepada tahapan mediasi dan rekonsiliasi.

Ketiga adalah hubungan. Kesalahan persepsi atau stereotip dari orang lain adalah penyebab umum dari konflik hubungan. Komunikasi yang buruk atau miskomunikasi seringkali menyebabkan perilaku negatif Ormas atau anggota Ormas terjadi berulang-ulang. Untuk permasalahan ini, poin pentingnya ialah bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan interaksi perilaku mereka berkontribusi untuk menimbulkan masalah.

Permasalahan hubungan, terdapat beberapa faktor yaitu rasa solidaritas organisasi, Konflik yang berulang, Tidak adanya hubungan baik anggota antar Ormas. Ketiga hal tersebut didukung dengan faktor ekonomi, sehingga memunculkan berbagai macam konflik dengan Ormas lainnya. Sedangkan beberapa daerah, konflik yang terjadi disebabkan adanya persinggungan terhadap nilai-nilai agama dan Stereotipe terhadap Ormas menimbulkan rasa curiga di tengah masyarakat yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan yang ada di masyarakat.

Keempat adalah nilai. Cara hidup yang berbeda, ideologi atau cara pandang adalah contoh bagaimana apa yang di nilai bisa menjadi bagian dari masalah. Memiliki kriteria yang berbeda untuk penelitian ide-ide adalah contoh lain. Permasalahan ini adalah semua tentang apa yang menghargai orang dan jika mereka berada di lingkungan yang sama tentang nilai-nilai.

### **Analisa Konflik Antar Ormas Serta Pola Penanganannya**

Manusia selaku individu dalam masyarakat mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini pemuda yang berperan sebagai pimpinan organisasi mempunyai ambisi yang harus di capai untuk kesejahteraan dan kesinambungan organisasi yang dipimpinya. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang paling berperan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa terjadi konflik, baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang berbeda, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan kata lain, pada setiap masyarakat senantiasa terdapat benih konflik yang dapat mencuat ke permukaan jika terdapat situasi yang mendukungnya. Konflik yang sering terjadi dalam hubungannya bermasyarakat adalah karena faktor

ekonomi, kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok mengakibatkan suatu kelompok merasa sakit hati dan benci terhadap kelompok lainnya. Sehingga konflik yang terjadi diantara dua organisasi atau kelompok dianggap merupakan jalan keluar yang baik yang harus dilakukan.

Pada tabel di bawah ini data bentrok dan pertikaian antar ormas yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya sepanjang Januari sampai dengan Mei 2020 yang didasarkan pada data Badan Intelijen dan Keamanan Polri:

Tabel 1  
Sumber: Data Baintelkam Polri  
DATA KONFLIK ORMAS JANUARI-MEI 2020

N O	KELOMPOK ORMAS	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KET
<b>JANUARI</b>			
1.	Bentrok Ormas GIBAS dengan Ormas BPPKB Banten,	<p>Perihal perkembangan bentrok Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten</p> <p>1. Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 bertempat di Mapolsek Cicalengka Jln. Dipati Ukur No.40, Ds. Cicalengka Kulon, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung telah dilaksanakan monitoring terkait perkembangan bentrok massa dari Ormas Gibas Kec. Cikancung dengan Ormas BPPKB Banten Kec. Cicalengka.</p> <p>2. Adapun awal mula terjadinya bentrokan Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten di Wilayah Hukum Polresta Bandung, antara lain :</p> <p>Pada hari Jum'at tgl 03 Januari 2020 bertempat di Kp Cinangsi Rt. 03/10 Desa Mandalasari Kec. Cikancung Kab. Bandung.</p> <p>pada pukul 21.00 wib sekelompok orang berjumlah lk 12 Orang dengan mengendarai kendaraan R2 sebanyak 6 unit dari Ormas BPPKB Ds. Cikuya Kec. Cicalengka dipimpin oleh Sdr. Agan datang kelokasi kejadian dari arah Cikasungka menuju Kp. Cinangsi Rt 03/10 tepatnya dirumah sdr.Vicky ( kantor sekretariat Ormas GIBAS ) dengan maksud utk menemui Ketua ormas Gibas Kec.Cikancung Sdr. Asep Beton tetapi sedang tidak berada di tempat hanya 5 orang anggota GiBAS yang sedang piket, kemudian ormas BPPKB Banten kembali sambil merobek bendera GIBAS.</p> <p>pada pukul 21.30 sekelompok orang masih dari Ormas BPPKB kembali lagi ke TKP dengan jumlah massa kurang lebih 20 orang akan tetapi dari pihak Ormas Gibas sudah siap menunggu di TKP sehingga bentrokan tidak bisa dihindari dan diduga 2 orang anggota Ormas BPPKB Banten tidak sempat melarikan diri sehingga menjadi korban pengeroyokan oleh anggota GiBAS yang mengakibatkan telah terjadi Perselisihan antara Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten yang mengakibatkan adanya korban An. Sdr. Hena Lesmana, Bdg, tgl 21-07-1984, Islam, alamat Kp. Pasir Pogor Rt 02 / 10 Ds. Cikuya Kec. Cicalengka kab.Bandung mengalami Luka robek dibagian paha dan 2 Jari putus oleh sabetan benda Tajam dan 1 orang lagi orang berhasil melarikan diri.</p> <p>Kejadian bentrokan ormas GIBAS dengan Ormas BPPKB Banten dipicu karena pembagian jatah dari proyek Pembangunan Tower di kp. peundeuy Ds.Hegarmanah yang belum disalurkan oleh pihak Ormas GIBAS sebesar Rp 11 juta dari pihak Proyek Tower dgn rincian utk wartawan sebesar Rp. 4 juta dan 7 juta utk ormas / LSM.</p> <p>Akibat bentrokan tersebut selain mengakibatkan Sdr. Hena Lesmana mengalami Luka robek dibagian paha dan 2 Jari</p>	Bentrok dipicu oleh rebutan pembagian proyek antara kedua ormas tersebut.

		<p>putus oleh sabetan benda Tajam di tempat kejadian juga telah diamankan Barang Bukti berupa 3 unit sepeda motor yang diduga milik ormas BPPKB Banten.</p> <p>Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul. 02.15 wib s/d.04.00 wib bertempat di Mapolsek Cikancung, telah dilaksanakan musyawarah antara ormas BPPKB dan ormas Gibas, terkait Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Sdr. Hena (anggota Ormas BPPKB Cikuya Cicalengka) yang dilakukan oleh pelaku yang diduga dari oknum anggota Gibas Cikancung dengan difasilitasi secara langsung oleh Kasat Intelkam AKP Syamsul Bagja, S.IK dan Kapolsek Cikancung AKP H. Syarifudin.</p> <p>Dalam musyawarah tsb dihadiri oleh perwakilan ormas BPPKB Kab. Bandung dan Ormas GIBAS Kab. Bandung sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang.</p> <p>Hasil musyawarah, di buatkan surat pernyataan yang isinya bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dengan perusahaan pembangun tower, di luar kepolisian.</li> <li>2. Kedua belah pihak sepakat akan menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kab Bandung</li> <li>3. Kedua belah pihak sepakat bahwa Tindak pidana akan di proses hukum oleh pihak Kepolisian.</li> </ol> <p>Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.00 Wib bertempat di Kantor sekertariat Gibas Jl. Raya Citarik Desa Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bdg telah dilaksanakan konsolidasi anggota dari ormas GIBAS Kab. Bandung Versi Ketua GIBAS sdr. Wakim dengan GIBAS Kota Bandung terkait adanya kejadian pengrusakan Kantor Sekretariat GIBAS yang dihadiri oleh pengurus GIBAS Kab. Bandung sdr. Maman dan Ketua GIBAS Kota Bandung sdr. Eggy beserta anggota ormas GIBAS sebanyak lk 50 orang.</p> <p>Sekitar Pukul 16.30 Wib, setelah melakukan konsolidasi massa dari Ormas GIBAS berencana untuk mendatangi Kantor GIBAS Kec. Cikancung utk mengecek secara langsung TKP pasca didatangi oleh Ormas BPPKB Banten. dilakukan himbuan oleh Kapolsek Cicalengka dan Danramil Cicalengka kepada anggota Gibas Kab.Bandung yang diwakili oleh sdr. Maman dan Ketua Gibas Kota Bandung sdr. Eggy serta sdr. Entis agar ormas gibas bisa menahan diri dan kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Polresta Bandung.</p> <p>Sekitar pukul 17.00 Wib anggota gibas Kota Bandung dan GIBAS Kab. Bandung bergeser menuju ke Kantor Sekretariat GIBAS Kec. Cikancung untuk melakukan peninjauan namun di tengah perjalanan massa dari Ormas GIBAS tiba - tiba berbelok arah dipertigaan jalan Raya Cicalengka - Cikancung mengarah ke kantor Sekretariat BPPKB Banten Kec. Cicalengka kemudian terjadi kembali bentrokan antara kedua ormas tersebut.</p>	
2.	Ormas BPPKB Bogor dengan Ormas PP Kota Bogor.	<p>Pada hari Senin tgl 20 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wib telah terjadi peristiwa pembakaran 5 (lima ) unit sepeda motor di TKP, awal kejadian dari keterangan saksi, 1 datang sekelompok orang menggunakan sepeda motor kurang lebih 15 motor berboncengan dari arah Yasmin dan berhenti di depan Bogor valley, kelompok tersebut diduga akan mengarah Cilebut, diketahui juga dari arah berlawanan dari simpang Cilebut datang sekelompok massa kurang lebih 100</p>	

		(seratus) orang berpakaian orange dan didepan Mega M berjalan menuju ke kelompok yang berhenti di depan Bogor valley dan tiba2 terjadi keributan penyerangan kepada pok tersebut karena kalah jumlah sehingga kelompok yang didepan Bogor valley berlarian sebageian masih di atas motor lari dan sebagian yang di parkir mening galkan motornya, yang tertinggal motornya oleh kelompok massa yang banyak di bakar sebanyak 5 (lima) unit dan ada 2 (dua) unit SPM yang masuk ke halaman parkir Bgr valley orangnya lari.	
3.	Ormas Pemuda Pancasila dengan LSM Laskar NKRI Karawang.	<p>Pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 12.30 wib s.d 13.00 wib telah terjadi keributan antar dua kelompok LSM dan ORMS dibawah Fly Over Cikampek yaitu Ormas Pemuda Pancasila dengan LSM Laskar NKRI, detail sebagai berikut :</p> <p>A. Kronologis terjadinya keributan antar kedua kelompok LSM dan ORMAS tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pukul 09.00 wib s.d 11.00 wib di Sekre GMBI telah berkumpul massa Aliansi Ormas dan LSM debgan tujuan untuk menghadang Aksi Unjukrasa yang akan dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila ke PT. FCC, namun setelah diberikan arahan oleh Jajaran Polres Karawang massa Aliansi Ormas dan LSM tersebut membubarkan diri dan sebelum terjadinya percobaan penyerangan diketahui massa Ormas Pemuda Pancasila berkumpul dibawah Fly Over Cikampek yang dipimpin Sdr. Cecep (Ketua PAC Cikampek) terkait adanya Video tantangan dari LSM NKRI Parakan Cikampek selanjutnya Ormas Pemuda Pancasila berangkat ke Polres Karawang untuk membuat LP.</li> <li>2. Pukul 12.30 wib s.d 13.00 wib dibawah Fly Over Cikampek, telah terjadi aksi sweaping oleh LSM Laskar NKRI Parakan Cikampek yang dipimpin Sdr. Beron (Ketua PAC Parakan Kec. Tirta Mulya) terhadap Ormas Pemuda Pancasila sepulang bubar dari karawang (sebelumnya telah dibubarkan aliansi ormas di sekre GMBI), dalam aksi Sweaping tersebut bertemu dengan sebagian massa dari Ormas Pemuda Pancasila yang masih berkumpul di bawah fly over, kemudian terjadilah aksi saling lempar dan di karenakan massa dari Ormas PP sedikit maka membubarkan diri, adapun massa dari LSM Laskar NKRI dapat diredam dan dibubarkan oleh pihak Kepolisian.</li> <li>3. Pukul 15.30 wib massa dari Ormas Pemuda Pancasila melakukan mobilisasi anggotanya untuk melakukan serangan balasan terhadap LSM Laskar NKRI dibawah Fly Over Cikampek dengan jumlah massa +- 100 orang, namun aksi tersebut dapat dihadang oleh Anggota Kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Cikampek Kopol Suprawadi SH dan Kasat Intelkam Polres Karawang AKP Rezky Kurniawan S S.IP serta Danramil 0406/ Cikampek Kapten Inf. Suryadi dan kemudian datang pasukan Dalmas Polres Karawang beserta Brimob Subden 3C Purwakarta dan berhasil di bubarkan dengan paksa dan diamankan 19 anggota Ormas PP.</li> </ol> <p>B. Aksi tersebut terjadi akibat adanya Video yang menyebar di media sosial terkait rencana aksi unjukrasa dari Pemuda Pancasila dan ditambah adanya keributan LSM NKRI Parakan Cikampek dengan Ormas Pemuda Pancasila di flay Over Cikampek yang menimbulkan reaksi dari Ormas Pemuda Pancasila diwilayah lain.</p>	

		<p>C. Dengan adanya kejadian tersebut Polres Karawang berhasil mengamankan Anggota Ormas Pemuda Pancasila sebanyak 19 orang, beberapa Cerurit, Parang, Balok Kayu, Botol Miras, 1 unit air soft Gun, 2 unit kendaraan R4 Ormas Pemuda Pancasila dan 1 unit R2 milik Ormas Pemuda Pancasila.</p> <p>1. Toyota Inova warna Loreng Orange PP Nopol : B 1396 XB.                  2. Toyota Avanza warna Sylver Nopol : B 1044 BKR.                  3. Mitshubishi Lancer warna Abu abu Nopol : B 2833 GY.</p>	
<b>FEBRUARI</b>			
		NIHIL	
<b>MARET</b>			
		NIHIL	
<b>APRIL</b>			
		NIHIL	
<b>MEI</b>			
1.	Bentrok Ormas BOS dengan Ormas PAGAR	<p>Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pkl.18.30 wib telah terjadi penganiayaan oleh pelaku yang mengaku dari Ormas BOS terhadap korban nama Ahmad Topik alias Bebek dari anggota Ormas PAGAR. TKP di Jl. Baranang siang (samping Jogja Griya Sunda), dan Cafe 67'S Jl. Sunda, Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Kronologis kejadian :</p> <p>Sekira pukul 18.15 Wib di ruas Jl. Baranang siang terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Ahmad Tofik anggota Ormas PAGAR oleh Sdr Korong dan Sdr. Geri anggota Ormas BOS, karena Sdr. Ahmad Topik, ada permasalahan proyek dimana Sdr. Ahmad Topik berusaha menengahi permasalahan antara Sdr. Korong dengan Nandj tetapi Sdr. Korong tidak terima akhirnya menganiaya Sdr. Ahmad Topik yang mengakibatkan Sdr. Ahmad Topik mengalami luka di bagian kepala. Selanjutnya Sdr. Nandi membawa Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.</p> <p>Sekitar pukul 18.30 wib, setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ahmad Topik pelaku Sdr. Korong cs menuju Cafe 67's untuk menanyakan permasalahan anggota Ormas BOS yang dirumahkan oleh manajemen Cafe 67'S dengan kondisi mabok dengan cara menggedor dan merusak pintu Cafe selanjutnya dihampiri oleh Sdr. Ari Rusmana tetapi tidak terima yang kemudian menganiaya Sdr. Ari Rusmana yang mengakibatkan luka sabetan senjata tajam di kening. Selanjut Sdr. Ari Rusmana dan Sdr. Nandi melaporkan kejadian penganiayaan ke SPKT Polrestabes Bandung</p>	
2.	Bentrok Ormas BPPKB dengan Ormas FBR di Depok.	<p>Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 18.00 Wib beralamat Jln. H.Kantong Rt 04/07 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok. oleh massa ormas FBR sebanyak kurang lebih 40 orang.</p> <p>Awal kejadian dipicu kesalahan pahaman penguasaan proyek perumahan Artha Graha Dimans Ormas BPPKB sudah dipercaya, namun saat itu ormas FBR datang ke lokasi untuk menemui Toto selaku GM namun GM tidak menemuinya karena Ormas FBR sudah mendapatkan bulanan sebesar 500 ribu per bulan.</p> <p>Yang berkahir terjadi kesalahfahaman dan pengerusakan Pos. Atas kejadian tersebut Pos BPPKB mengalami kerugian kaca pintu dan kaca jendela dan dinding rusak.</p>	

		Upaya yang dilakukan Polsek Cimanggis memediasi ormas BPPKB Banten dan FBR dengan hasil yang disepakati dengan menyelesaikan secara musyawarah untuk menjaga situasi keamanan tidak akan memperburuk kondisi tersebut, apabila ada oknum yang melanggar akan ditindak tegas . Selanjutnya surat kesepakatan ditanda tangani ketua DPC BPPKB Banten Depok H. Nuryadi dengan Korwil FBR Depok Raya H. Nawi.	
3.	Bentrok Ormas Sapu Jagat dengan Ormas BPPKB di Jl. Raya Cianjur-Sukabumi, Jawa Barat	Pada hari Kamis tgl 21 mei 2020 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Raya Cianjur - Sukabumi kp. Jatisari Desa Cikahuripan Kec Gekbrong (dekat PT. Garmen BSK Cikahuripan Kec Gekbrong Kab Cianjur telah terjadi Penganiayaan. Kronologis kejadian Pada hari Kamis tgl 21 Mei 2020 sekita jam 17.30 Wib Sdr. Aris sedang ngetem angkutan umum bersama teman2 pengemudi angkutan lainnya di tempat kejadian, lalu datang sdr Doni menggunakan masker di bonceng sp.motor nopol tidak tahu, dan turun menghampiri sdr Aris, sdr Bajai dan sdr Ujang, lalu mengeluarkan sebilah golok dan langsung bicara "KAMU ANAK SAPUJAGAT..." sambil menebaskan Golok tersebut ke arah sdr Aris dan tebasan golok tersebut ditahan oleh sdr Aris menggunakan tangan kanannya, akibat tebasan golok tersebut sdr Aris mengalami luka sobek berdarah di jempol tangan kanannya. Selanjutnya korban An. Sdr Aris di berikan pertolongan dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Sukabumi untuk tindakan medis.	
4.	Karangtaruna Kec. Sadananya dengan Ormas Pemuda Pancasila PAC Sadananya Kab. Ciamis, Jawa Barat.	Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 dari jam 17.00 WIB bertempat di Dsn. Tonggoh Ds. dan Kec. Sadananya Kab. Ciamis tepatnya di Mesjid Baeturrohman/Mesjid besar Kec. Sadananya telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Asep Kecot (Ketua Karangtaruna Kec. Sadananya) yang diduga dilakukan oleh lk. 15 (lima belas) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila PAC Sadananya Kab. Ciamis yang dipimpin oleh Sdr. Abuy (Ketua Ormas PP PAC Sadananya). Kronologis kejadian sekitar jam 17.00 WIB anggota Ormas PP PAC Sadananya yang berjumlah lk. 15 (lima belas) yang dipimpin oleh Sdr. Abuy (Ketua Ormas PP PAC Sadananya) datang ke TKP dengan maksud untuk mencari Sdr. Unes yang diduga pelaku pengrusakan gerobak dagang yang berada di Sekretariat Ormas PP PAC Sadananya pada saat malam takbir, sesampainya di TKP Ormas PP bertemu dengan Sdr. Asep Kecot (Ketua Karangtaruna Kec. Sadananya) dan menanyakan maksud dari anggota Ormas PP yang datang ke wilayah Sadananya secara bergerombol, dalam pertemuan tersebut terjadi percekocokan antara anggota Ormas PP dengan Sdr. Asep Kecot dan berujung pada dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Asep Kecot, mengetahui kejadian tersebut para pemuda dan warga yang berada di sekitar TKP secara spontan berdatangan dan menyerang kembali anggota Ormas PP hingga melarikandiri ke arah Sekretariat Ormas PP PAC Sadananya, selanjutnya warga (masaa) Kec. Sadananya berkumpul di sekitar TKP untuk mengantisipasi adanya penyerangan kembali dari Ormas	
5.	Bentrok LSM GIBAS dengan LSM	Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib dibawah Flyover Cikampek Kab. Karawang telah terjadi keributan antara LSM Gibas dengan LSM NKRI yang	-

	<p>NKRI, Kab. Karawang.</p>	<p>mengakibatkan korban dari LSM Gibas mengalami luka sobek senjata tajam pada bagian Kepala hingga di jahit sebanyak 15 jahitan luar, jahitan dalam 7 kedalaman luka 5 cm.</p> <p>Kronologis kejadian pada tanggal 26 Mei 2020 telah terjadi penurunan bendera LSM NKRI yang dilakukan oleh LSM GIBAS Cikampek, sehingga anak LSM NKRI tidak terima adanya kejadian tersebut namun hal tersebut dapat direda dan rencananya akan dilakukan mediasi pada hari ini di Polsek Cikampek. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib adanya kumpul anggota NKRI +- 30 orang di bawah flyover Cikampek dalam rangka antisipasi terjadinya penurunan bendera kembali oleh LSM GIBAS.</p> <p>Adanya berkumpul tersebut oleh Kanit Reskrim Polsek Cikampek untuk membubarkan diri dan diminta perwakilan untuk melakukan mediasi di Polsek Cikampek agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak.</p> <p>Kemudian sekira pukul 11.30 wib Ketua LSM GIBAS Cikampek Sdr. Suhaeri bersama rekannya melintas di bawah flyover Cikampek ditempat berkumpulnya LSM NKRI dan pada saat itu juga Ketua LSM GIBAS Cikampek langsung dihadang oleh LSM NKRI dan terjadilah pengeroyokan terhadap ketua LSM GIBAS Cikampek tersebut.</p> <p>Akibat penganiayaan tersebut saat ini Sdr. Suhaeri sedang dilakukan tindakan perawatan oleh pihak RS. HELSA Cikampek, Jawa Barat.</p>	
<p>6.</p>	<p>Ormas Pemuda Pancasila Dengan Ormas BPPKB</p>	<p>Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di wilayah Kec. Parung Kab. Bogor telah terjadi kesalahpahaman antara ormas Pemuda Pancasila PAC Parung dan Ormas BPPKB DPAC Parung yang merupakan Imbas dari kejadian bentrok antara ormas tersebut di wilayah Tangerang.</p> <p>Adapun rangkaian kejadian sebagai berikut:                  Pada jam 15.00 Wib di Jl. Raya Parung Bogor Depan Alfamidi Ds. Jabon, Kec. Parung telah terjadi penganiayaan Terhadap sdr. Asan Basri, 43 Thn Alamat Jabon Mekar RT. 02/01 Desa Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor yang di duga di lakukan oleh anggota BPPKB BANTEN.</p> <p>Awal Mula kejadian korban saat melintas di jalan raya Parung Bogor sewaktu pulang kerja dengan menggunakan R2 tiba tiba dibacok dari belakang oleh rombongan BPPKB BANTEN yang mengendarai sekitar kurang lebih 50 motor dari Arah Depok yang menuju Kecamatan Kemang, Sehingga korban mengalami luka bacokan pada bagian tangan kanan. Saat ini korban berada dirumah korban.</p> <p>Selanjutnya rencana pada hari Senin akan di lakukan operasi. Korban di bacok di duga salah seorang sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila karena di sepion motor korban ada topi ambang Pemuda Pancasila. Untuk saat ini pihak dari Ormas Pemuda Pancasila yang di wakili Sdr. Martin akan membuat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.</p> <p>Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Aula Polsek Parung Kec. Parung Kab. Bogor telah dilaksanakan mediasi oleh Ormas PP (Pemuda Pancasila) PAC Parung dengan Ormas BPPKB Banten PAC Parung. Mediasi tersebut terkait adanya penganiayaan Sdr. Asan Basri (anggota Ormas PP) oleh orang yang diduga</p>	<p>Kejadian bentrok dipicu oleh kesalahpahaman.</p>

		anggota Ormas BPPKB di Depan Alfamidi Ds. Jabon Kec. Parung, Bogor.	
6.	Bentrok Ormas PP dengan PSHT diwilayah Kota Bekasi Barat.	<p>Pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 18.15 s.d 18.45 Wib bertempat di jalan baru Jl. I. Gusti Ngurah Rai RW 14, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah terjadi bentrokan antara Ormas PHT dengan Ormas MPC PP Kota Bekasi, permasalahan tersebut terkait lanjutan kejadian antara kedua Ormas di Warung Kopi Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel Bintara Kec Bekasi Barat pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 22.00 Wib.</p> <p>Kejadian permasalahan pada hari Rabu 20 Mei 2020 pukul 22.00 antara ormas PSHT dengan pihak MPC Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi saat itu sudah dilakukan mediasi di Mapolsek Bekasi Kota dengan mediasi membuahkan hasil kesepakatan untuk saling berdamai yang dilakukan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00 Wib</p> <p>Bentrokan tersebut terjadi setelah dilakukan mediasi antara perwakilan Ormas PSHT dengan MPC Ormas Pemuda Pancasila, Kota Bekasi namun masa PSHT yang berada di Jalan Baru I Gusti Ngurah Rai RW 14 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi barat Kota Bekasi telah menduduki posko Bansos Covid-19 milik MPC PP Kota Bekasi, sehingga Ormas MPC PP Kota Bekasi tidak terima sehingga terjadilah bentrokan dikarenakan pos tersebut diduduki kemudian bentrokan.</p> <p>Bentrokan antara kedua ormas mengakibatkan kerugian materil di sepanjang Jl. Baru I Gusti Ngurah Rai, RW 14 Kelurahan, Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.</p>	
7.	Ormas Gabungan FBR dan BPPKB vs Pemuda Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berawal dari perparkiran di pasar malam jalan Matraman Raya dengan kesepakatan dikelola oleh FBR Gardu 291 (Demang Mester) dan BPPKB setempat, dan apabila ada kelompok lain yang akan ikut berpartisipasi harus mendapat persetujuan/menghubungi ketua FBR Balimester.</li> <li>2. Pada saat berlangsungnya pasar malam terdapat beberapa orang dari kelompok yang tidak ikut dalam kesepakatan (yang diduga dari ormas PP) ikut menjadi juru parkir sehingga terjadi cekcok/adu mulut.</li> <li>3. Atas kejadian tersebut Bhabinkamtibmas Balimester, BRIPKA DANANG dan Ketua RW 001 Kel. Rawa Bunga memfasilitasi untuk dilakukan mediasi.</li> <li>4. Pada pukul 23.15 WIB Kelompok dari PP dan Ketua RW 001 Kel. Rawa Bunga merasa tidak puas dan kembali ke tempat parkir semula di Pasar Ikan yang berada di seberang lokasi Pasar Malam. Tidak lama setelah itu dari arah lokasi pasar ikan terjadi pelemparan ke arah Pasar Malam dengan menggunakan batu dan kembang api, sehingga terjadi aksi saling balas.</li> <li>5. Pada sekitar pukul 23.50 WIB Tim dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes ARIE ARDIAN RISHADI, SIK datang untuk melerai tawuran.6. Dan diamankan sekitar 10 orang yang terlibat tawuran, dari pihak FBR Gardu 291 (Demang Mester)</li> <li>6. Adapun Korban: Nihil, Kerugian : 4 buah kaca Akuarium pecah.</li> </ol> <p>Tindakan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Timur saat ini yaitu :1. Melakukan penjagaan di sekitar lokasi Tawuran.2.</p>	Perebutan lahan parkir

	Berencana memanggil kedua belah pihak yang bertikai untuk dilakukan mediasi (namun sampai saat ini belum terlaksana).	
--	---	--

Menurut Gustave le Bon (1895:31), massa itu mempunyai sifat-sifat psikologi tersendiri. Orang yang bergabung dalam suatu massa akan berbuat sesuatu, yang perbuatan tersebut tidak akan dilakukan bila individu itu terkadang dalam suatu massa. Sehingga massa itu akan mempunyai daya melarutkan individu dalam suatu massa, malarutkan individu dalam jiwa massa. Seperti dikemukakan oleh Durkheim (1965:26) bahwa adanya *individual mind* dan *collective mind*, yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Gustave Le Bon (1985:48) dalam massa itu terdapat apa yang dinamakan hukum *mental unity* atau *law of mental unity*, yaitu bahwa dalam massa adanya kesatuan mind, kesatuan jiwa, seperti yang dikemukakan olehnya, “*whoever be the individuals that compose it, however like ot unlike be their mode of life, thei occupations, their character, or their intellegiences, the fact that they have been transformed into a crowd puts them in possession of collective mind.*”

Sedangkan menurut Allport sekalipun kurang dapat menyetujui tentang *collective mind*, tetapi dapat mamahami tentang pemikiran adanya kesamaan (*conformity*), tidak hanya dalam hal berfikir dan kepercayaan, tetapi juga dalam hal kepercayaan (*feeling*) dan dalam perbuatan yang menampak (*overt behaviour*). Sedangkan Mc. Dougall (1908:24) menekankan pada adanya *homogeneity* dalam *panic (escape mob)* seperti yang dikemukakannya:

“*there is one kind of objecct in the presence of which no man t/remains indifferent and shich evokes in almost all men the same emotion, namely, impending danger, hence the sudden appearance of imminent danger the characteristic and terrible phenomena of a panic.*”

Disamping sifat-sifat yang telah disebutkan di atas massa itu masih mempunyai sifat-sifat antara lain, yaitu:

- a. Impulsif, ini beratti massa itu akan mudah memberikan respons terhadap rangsang atau stimulus yang diterimanya. Karena sifat impulsifnya ini, maka massa itu ingin bertindak cepat sebagai reaksi terhadap stimulus yang diterimanya.
- b. Mudah sekali tersinggung. Karena massa itu mudah sekali tersinggung, maka untuk membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimuli yang dapat menyinggung perasaan massa yang bersangkutan.
- c. Sugestibel, ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar.
- d. Tidak rasional, karena massa itu sugestibel, maka massa itu dalam berindak tidak rasional, dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen.
- e. Adanya *social facilitation* (F. Allport) yaitu adanya suatu penguatan aktivitas, yang disebabkan karena adanya aktivitas individu lain. Perbuatan individu lain dapat merangsang perbuatan individu lain yang trgabung dalam massa itu. Menurut Tarde disebut *imitation*, sedangkan menurut Sighele disebut *sugestion*, dan menurut Gustave Le Bon sebagai *Contagion and suggestion*, dan dalam suasana ini terdapat suasana hipnotik (Lih. Lindzey, 1959:158).

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui “Jalan Reformasi Berdarah” telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA. (Haris, 1999:5).

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan

terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena kekacauan yang disebabkan oleh sejumlah ormas seperti adanya bentrok antar ormas, hilangnya orang lain karena diduga ikut serta dalam suatu ormas, hingga adanya ormas yang dalam penyampaian pendapatnya tidak dilakukan dengan aksi damai dan sering sekali membuat keributan dengan aksi anarkis. (Thera, 2014:8).

Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang mengikis rasa aman, tuntutan atas pembubaran ormas anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengecam negara yang seperti tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Meskipun polemik atas pembubaran ormas masih terjebak dalam perdebatan sejumlah tokoh tetapi pemerintah harus melakukan tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi hak kebebasan masyarakat lain yang merasa bahwa kebebasannya telah direnggut oleh ormas anarkis yang menyebabkan rasa takut dan tidak aman di dalam negeri ini.

### **Peran Polri dan Langkah Optimalisasi**

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan (Joseph, 1971:717). Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Merujuk pada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : 1) penghentian kekerasan fisik; 2) penetapan Status Keadaan Konflik; 3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau 4) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkan. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugasnya di tengah-tengah masyarakat obyeknya antara lain masyarakat dalam wilayah tertentu yang didiami oleh masyarakat tersebut, maka potensi yang ada di masyarakat harus diupayakan pemanfaatannya agar dapat didayagunakan dalam rangka untuk mencapai tugas pokok Polri. Untuk itu, potensi tersebut harus diupayakan dapat berpartisipasi dalam usaha menciptakan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tertib dan dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat *tata tenterem kerta raharja* (Djunaedi, 1993:22).

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai

perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan bantuan langsung di daerah-daerah khusus, membantu menyiapkan perencanaan kontinjensi, dan memberikan peringatan dini. Intelijen juga memberikan analisa perkembangan skenario-skenario yang mungkin dihadapi.

Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Didalam intelkam polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Pada hakekatnya system deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Intelejen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya Sebagai Kepala/Komandan, Sebagai unsur pemerintah, Sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan. Sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sarannya.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001:126), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkikan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Adapun intelijen menghasilkan produk-produk intelijen. Produk intelijen adalah suatu bentuk pelaporan hasil dari kegiatan operasional intelijen setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran, atau tulisan dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan intelijen sbg hasil kegiatan operasional intelijen, melalui proses pengolahan dan administrasi yang disusun sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah ditentukan dan erat hubungan dgn tugas-tugas kamtibmas.

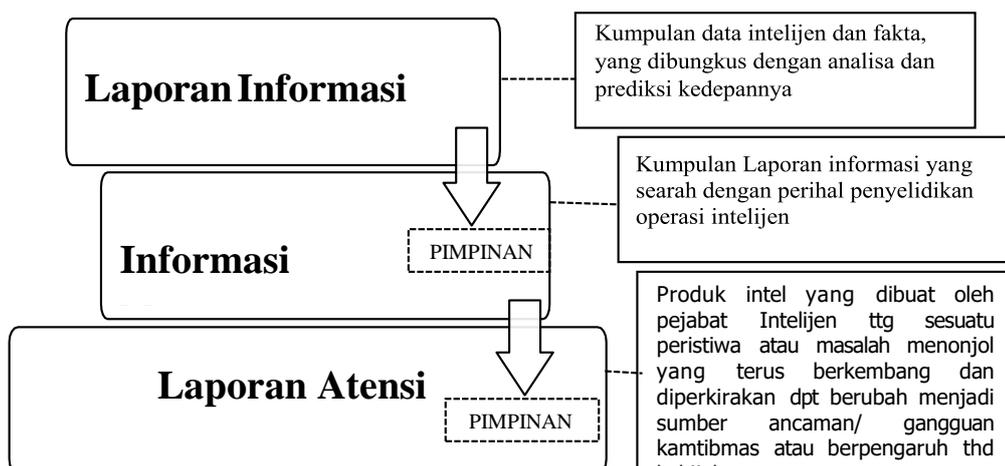


Gambar 1.  
Sumber: Naskah Pencerahan Intelkam, 2012  
Produk Intelijen

Kegiatan intelijen merupakan salah satu kegiatan fungsi operasional Plri yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam bentuk *Human Intelligent* dan *Electronic Intelligent* (*Signal Intelligent, Open Source Intelligent, Imaginary Intelligent, Measurement Intelligent, dan Telemetry intelligent*) terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan pada umumnya. Kegiatan intelijen tersebut adalah:

Data intelijen (mentah) disebut juga bahan keterangan (tanda-tanda, gejala-gejala, fakta, masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, menghayati dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi (Perkabik No 2 Tahun 2013). Dalam kegiatan intelijen pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dilaksanakan oleh Agent Action (AA) dengan berpedoman pada Perkabik No 1 Tahun 2013 perihal penyelidikan intelijen. Bahan keterangan atau data intelijen diolah menjadi laporan informasi dengan menimbang Fakta, analisa, prediksi, saran, kesimpulan dan rekomendasi.

Proses sebuah data menjadi informasi yang layak adalah :



Gambar 2.  
Sumber: Naskah Pencerahan Intelkam Polri, 2012  
Proses Data Mentah Menjadi Informasi

Dalam hal ini intelijen mempunyai pola kegiatan taktis yaitu penyelidikan awal dan disertai dengan pengembangan kegiatan berupa penggalangan intelijen dan kontra intelijen, untuk meminimalisir resiko kegiatan pengamanan intelijen di perlukan dalam sebuah kegiatan taktis intelijen, hasil dari kegiatan taktis tersebut yang dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban

anggaran dan kegiatan dituangkan dalam Laporan Penugasan yang akan berkembang menjadi Laporan atensi untuk pengambilan keputusan berikutnya oleh pimpinan.

Dalam konteks penanganan konflik, opsi militer dirasakan kurang pas dengan iklim baru ini. Pemerintahan sipil, masyarakat, parlemen dan media serta berbagai kelompok, penekan (*pressure groups*) lainnya kurang menyukai opsi operasi militer untuk penyelesaian konflik. Oleh karenanya pemerintahan reformasi mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya (Tito Karnavian, 2017:24).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto (1999:48) penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh ormas. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.

Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka konflik antar ormas relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras.

Pada akhirnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ormas di Indonesia kehadirannya di tengah masyarakat menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut. Bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya, utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan, berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan berpotensi menjadi alat untuk melegalisasikan keberadaan premanisme.

Pada posisi tersebut terdapat signifikansi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah berkewajiban untuk

mengeluarkan kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai konflik besar, baik kebijakan pencegahan, penghentian, dan maupun pemulihan paska konflik. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian konflik bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya penanganan sampai kepada tahapan mediasi dan rekonsiliasi.

Konflik antar Ormas terjadi dan berulang tersebut disebabkan perekonomian (Pengangguran, Pemuda, dan perebutan wilayah). Namun bentrok yang terjadi tidak pernah sampai kepada bentrok fisik, masih pada tahapan lempar-lemparan batu dan pembakaran properti seperti kendaraan dan simbol Ormas. Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan dengan cara damai melalui memanggil masing-masing pihak yang berseteru untuk bertemu dan selalu didampingi oleh pihak kepolisian. Proses hukum terus berjalan berdasarkan pengaduan dari pihak Ormas yang dirugikan.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat. Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu :

- 1). Untuk mencari kebenaran factual;
- 2). Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul Baintelkam perlu melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar dapat berhasil guna serta berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif. Diajukan sejumlah rekomendasi agar Polri dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam penanganan konflik antar ormas sebagai berikut:

Polri perlu mengintensifkan pelibatan fungsi reserse dan Bimmas semua tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan dan deteksi dalam upaya pencegahan konflik. Intelijen, Bimmas dan Humas Polda Metro Jaya perlu diperkuat dengan dukungan personel, anggaran dan peralatan yang memadai untuk memaksimalkan upaya pendekatan lunak. Backup dari Mabes Polri juga diperlukan, khususnya untuk kegiatan intelijen dan Bimmas. Untuk itu perlu diatur sistem anggaran khusus dalam sistem anggaran Polri guna mendukung upaya ini.

Bahwa Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejala yang mungkin dapat terjadi dimasyarakat yang dapat mengganggu situasi kamtibmas, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini Baintelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok Polri.

Diperlukan juga pelatihan peningkatan kemampuan penyelidikan, pengamanan serta penggalangan secara berkala, mengingat situasi masyarakat yang terus berkembang. Selain kemampuan tersebut, perlu juga dibekali dengan kemampuan lain seperti:

- a) Kemampuan untuk dengan segera mengenali lingkungan atau penyesuaian diri agar tidak menjadi sasaran lawan.
- b) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah terutama masalah konflik Vertikal atau Horizontal dan kriminal lainnya.
- c) Kemampuan perorangan seperti survival.
- d) Kemampuan bahasa, karena masyarakat yang dihadapi sangat homogen sehingga sulit untuk menerima masuknya orang baru.
- e) Kemampuan bersosialisasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja untuk memperoleh banyak informasi.

Yang memiliki peran besar dalam penanggulangan konflik antar ormas selain Polri adalah TNI, Pemerintah baik pusat maupun daerah serta tokoh-tokoh yang ada baik tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama kesemuanya memiliki peran penting. Pertama, dalam konteks pertahanan dan keamanan, sinergitas antara Polri dan TNI merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana kerjasama antara keduanya khususnya dalam sebuah operasi merupakan tonggak keberhasilan terciptanya keamanan dan ketertiban, dikarenakan masing-masing memiliki kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan konflik.

Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan kunci dari kebijakan-kebijakan yang akan menentukan kemana arah kesejahteraan masyarakat, dimana antara kesejahteraan dan tingkat kerawanan kita ketahui sangat berbanding. Saat kesejahteraan meningkat maka dapat dipastikan tingkat kerawanan sebuah wilayah akan mengalami penurunan. Ketiga, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang mana mereka-mereka ini yang paling dekat dan paling mengerti keadaan masyarakat setempat, ditambah lagi suara, saran dan pendapatnya juga didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masukan-masukan dari mereka sangat berarti bagi upaya penanggulangan konflik di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Heryanto. (1999). *The Years of Living Luxuriously: Identity Politics of Indonesia's New Rich*. London: Routledge.
- Djunaidi Maskat H. (1993). *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Sanyata Sumanasa Wira.
- Dra. Nia Kania Winayanti, S.H., M.H, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Durkheim. (1965). *Professional Ethics and Civic Morals*. Cornelia Brookfield.
- Haris, Syamsuddin. (1999). *Indonesia Diambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Ashidiqie, (2010). *Konsep Negara Hukum Indonesia*. Jimly Sch.

- Karnavian, Tito M. (2017). *Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Edisi 089. Agustus-Oktober.
- Le Bon, Gustave. (1985). *The Crowd: A Study of a Popular Mind*.
- Nitibaskara, T. Ronny. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Penerbit Peradaban: Jakarta.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rachman. (2018) *Membangun Supremasi dan Kesadaran Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. I, No.2. Universitas Indonesia.
- Rian Thera. (2014). *Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Di Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Vol.3 No.1 Jurnal Ilmu Universitas Surabaya.
- Thahir, S.L. (2006). *Refleksi Hubungan Keagamaan Di Poso Sebelum Dan Pasca Konflik: Menuju Kehidupan Damai*.
- Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun. (2012). *Naskah pencerahan intelkam*. Jakarta: Baintelkam POLRI.